

ARTIKEL

Mengapa Partai Islam Belum Pernah Menang?: *Path Dependence Repetition* Kekalahan Partai Islam Indonesia Dalam Pemilu Legislatif 1955 Hingga 2019

Agus Riyanto

186-217

Gerakan Syarikat Islam Kembali Ke Khittah Tahun 1905

Gugun Wardiono, Bowo Sugiarto, Ahmad Rofik

218-239

Internationalization Of Islam *Rahmatan Lil 'Alamin* Through Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (PCINU): Motivation And Contribution

Andi Purwono

240-257

Dinasti Politik: Basis Politik dan Kepuasan Publik

Wimmy Haliim, Andy Ilman Hakim

258-273

Analisis Biopolitik Dan Kontrol Populasi Penduduk Melalui Program Keluarga Berencana Di Kota Samarinda

M. Najeri Al Syahrin, Mochamad Dziaqie Aulia Al Farauqi, Sri Wahyuni Jamal

274-295

Pemanfaatan Modal Sosial Appi Dalam Pemilihan Kepala Daerah Di Kota Makassar

Hidayat Doe, Muhammad, Sukri, Ariana

296-312

RESENSI BUKU

Oligarki Di Indonesia: Relasi Kapital Yang Dominan

Sunardi

313-317

MENGAPA PARTAI ISLAM BELUM PERNAH MENANG?: PATH DEPENDENCE REPETITION KEKALAHAN PARTAI ISLAM INDONESIA DALAM PEMILU LEGISLATIF 1955 HINGGA 2019

Agus Riyanto

Mahasiswa S3 Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada

Email: mr.gusryanto@gmail.com

Abstrak

Indonesia secara sosiologis merupakan negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, tetapi belum pernah ada partai Islam yang berhasil memenangkan kompetisi elektoral pemilu legislatif sejak Orde Lama hingga era reformasi. Terdapat beragam kajian, namun masih jarang kajian yang mengkaitkan kekalahan partai Islam dengan sejarahnya sendiri sebagai konteks. Studi ini menggunakan perspektif institusionalisme historis yaitu analisis path dependence dan critical junctures mengkaji kekalahan partai Islam Indonesia dengan mengkaitkan keputusan politik agen pada masa lalu dalam momen critical junctures. Studi ini menawarkan dua temuan utama. Pertama, kekalahan partai Islam Indonesia sepanjang lintasan politik sejak pemilu 1955 hingga 2019 merupakan hasil dari mekanisme kausal yang terkait keputusan politik agen dalam momen critical junctures yang memiliki efek signifikan terhadap jalur perkembangan partai Islam dan mengarahkan kepada outcomes kekalahan. Kedua, kekalahan partai Islam Indonesia mengindikasikan sebuah path dependence repetition meliputi tiga proses path dependence yang dipicu oleh tiga momen critical junctures berupa keputusan politik agen partai. Masing-masing menghasilkan rangkaian peristiwa lanjutan kausal dalam tahapan the aftermath of critical juncture yaitu proses reactive sequences, reinforcement atau self reinforcing sequences, serta reinforcement atau self reinforcing sequences dan reactive sequence, dan meletakkan partai Islam ke dalam jalur perkembangan tertentu menuju final outcome kekalahan pemilu legislatif.

Kata Kunci:

Critical Junctures, Keputusan Agen, Path Dependence

Abstract

Sociologically, Indonesia is a country with the largest Muslim population in the world, however no Islamic party has ever won the legislative electoral since the Old Order. There are limited research which link the defeat of Islamic parties with their own history as a context. This study uses the perspective of historical institutionalism, particularly the analysis of path dependencies and critical junctures to analyze the defeat of Indonesian Islamic parties by linking the past political decisions in a critical junctures framework. This study has two main findings. First, the defeat of Indonesian Islamic parties during 1955 to 2019 elections was the result of a causal mechanism which was related to political decisions in moments of critical junctures. The mechanism had a significant effect on the path of development of Islamic parties and led to the outcome of defeat. Second, the defeat of the Indonesian Islamic party

indicates a path of dependence repetition which includes three process dependence paths triggered by three critical moments in the form of political decisions of party agents. Each resulted in a series of causal follow-up events in the aftermath of critical juncture, which were the process of reactive sequences, reinforcement or self-reinforcing sequences, as well as reinforcement or self-reinforcing sequences and reactive sequences, and put Islamic parties on a certain development path towards the final outcome of the legislative election defeat.

Keywords:

Critical Junctures, Agent Decisions, Path Dependence

Pendahuluan

Studi ini mengkaji kekalahan partai Islam dalam pemilu legislatif sepanjang lintasan politik Indonesia sejak Orde Lama hingga era reformasi, pemilu 1955 sampai 2019, dengan menggunakan pendekatan institusionalisme historis yaitu alat analisis *path dependence* dan *critical junctures*. Latar belakang studi ini tidak lepas dari realitas politik meskipun Indonesia secara sosiologis diklaim negara Muslim terbesar di dunia, namun belum ada satu partai Islam pun yang pernah memenangkan kontestasi pemilu legislatif.

Pemilu pertama tahun 1955 era rezim Orde Lama pemenangnya Partai Nasional Indonesia (PNI), partai berhaluan ideologi nasionalis sekuler.¹ Kemudian ketika era rezim Orde Baru di bawah Soeharto, partai Islam selalu mengalami kekalahan dari pemilu tahun 1971 sampai 1997. Hal ini tidak lepas dari kebijakan politik Soeharto yang melakukan *setting* kelembagaan (*institutional setting*), mengebiri partai politik termasuk partai Islam sehingga termarginalkan dan tidak bisa menandingi hegemoni Golongan Karya (Golkar), kendaran politik rezim Orde Baru.²

Tahun 1998 rezim Orde Baru tumbang, ditandai lengsernya Soeharto sebagai presiden pada 21 Mei 1998 digantikan Habibie serta diikuti liberalisasi politik antara lain kebebasan kembali mendirikan partai politik serta memberikan ruang politik dan peluang sama berkompetisi dalam arena elektoral. Namun demikian partai Islam kembali mengulangi sejarah kekealahannya.³ Pemilu legislatif pertama pasca Soeharto

¹ Untuk pemilu 1955, lihat Herbert Feith, *Pemilu 1955* (Jakarta: LP3ES, 1985).

² Gaffar menyebut sistem kepartaian era Orde Baru sebagai sistem kepartaian yang hegemonik, lihat Afan Gaffar, *Javanese Voters* (Yogyakarta: UGM Press, 1982).

³ Tentang suara partai Islam pada era reformasi lihat Moch Nurhasim (ed.), *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016).

lengser tahun 1999 dimenangkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), pemilu 2004 giliran Golkar, pemilu 2009 pemenangnya Demokrat, kemudian pemilu 2014 dan 2019, kembali PDIP secara berturut-turut.⁴

Realitas di atas kontras dengan kawasan Timur Tengah dan Afrika Utara yang beberapa partai Islam pernah meraih kemenangan misalnya *Ikhwanul Muslimin* (IM) di Mesir⁵, *The Islamic Salvation* atau FIS di Aljazair,⁶ dan Partai *Refah* di Turki,⁷ meskipun ketiganya tidak bisa bertahan akibat intervensi militer. Sedangkan yang fenomenal adalah *Adeletve Kalkinma Partisi* atau AKP di Turki yang menang pemilu sejak tahun 2002 serta menguasai pemerintahan dalam waktu cukup lama terutama di bawah Recep Tayyip Erdogan.⁸

Selain itu masih jarang kajian kekalahan partai Islam Indonesia yang mengkaitkan dengan peristiwa historis pada masa lalu. Setidaknya ada empat jenis penjelasan kajian. *Pertama*, penjelasan perilaku memilih (*voting behaviour*) yang menekankan transformasi perilaku memilih (*voting behaviour*) Muslim sebagai faktor determinan penyebab kekalahan seperti kajian Mujani dan Liddle,⁹ maupun Pepinsky, Liddle dan Mujani.¹⁰ *Kedua*, penjelasan pelembagaan partai (*party institutionalization*) yang menekankan kondisi stabilitas pelembagaan partai sebagai faktor kunci penyebab

⁴ Tentang hasil pemilu legislatif 1999-2019, lihat Lili Romli, *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019).

⁵ Kajian-kajian tentang *Ikhwanul Muslim* antara lain Tarek El-Miselhy Masoud, "Why Islam Wins: Electoral Ecologies and Economies of Political Islam in Contemporary Egypt". *Dissertation*. (Connecticut: Yale University, 2008), dan "The Muslim Brotherhood In Egypt" dalam John L. Esposito & Emad El-Din Shahin (ed), *The Oxford Handbook of Islam and Politics* (Oxford: Oxford University Press, 2013); serta Sami Zemni & Koenraad Bogaert, "Egyptian Muslim Brotherhood and Competitive Politics" dalam Mohammed Salih (ed), *Interpreting Islamic Political Parties* (Houndmills, Basingstoke RG21 6XS, England: Palgrave Macmillan, 2009), h. 149–166.

⁶ Kajian-kajian tentang FIS di Aljazair antara lain Emad Eldin Shahin, *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa* (Boulder: Westview Press, 1997).

⁷ Haldun Gulalp, "Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of the Refah Party" dalam *The Muslim World*, Vol. 89, No. 1 (1999), h. 22-41.

⁸ Kajian tentang AKP di Turki antara lain Ekrem Karakoc & Elisabeth Gidengil, "Which Matters More in The Electoral Success of Islamist (successor) Parties: Turkish Case" dalam *Party Politics*, Vol. 22, No. 3 (2016), h. 325-338; Sitoesmi S. Seokanto, *Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia: Studi Perbandingan* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016); Anthony Bubalo, Greg Fealy & Whit Mason, *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki* (Depok: Komunitas Bambu, 2012).

⁹ Saiful Mujani & R. William Liddle, "Muslim Indonesia's Secular Democracy" dalam *Asian Survey*, Vol. 49, No. 4 (2009), h. 575-590.

¹⁰ Thomas B. Pepinsky, William Liddle & Saiful Mujani, "Testing Islam Political Advantage: Evidence From Indonesia" dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 56, No. 3 (2012), h. 584-600.

kekalahan seperti Hamayotsu,¹¹ Nuryanti,¹² Annisa,¹³ Nurhasim,¹⁴ maupun Madinier.¹⁵ *Ketiga*, penjelasan lingkungan politik (*political environment*) yang berfokus kepada aspek lingkungan eksternal sebagai penyebab kekalahan seperti kajian Warjio,¹⁶ maupun Woinschik dan Muller.¹⁷ *Keempat*, penjelasan integratif yang menjelaskan kekalahan partai Islam dari aspek internal maupun eksternal di luar partai sebagaimana kajian Romli,¹⁸ Yumitro,¹⁹ Miichi,²⁰ Haris,²¹ dan Nurhasim.²²

Keempat penjelasan tersebut mayoritas lebih bersifat parsial yang dibatasi per periode politik, belum ada yang mencoba mengkaitkan efek keputusan politik yang dibuat agen partai terhadap penyebab kekalahan, serta belum ada yang mencoba mengkaitkan kekalahan dengan peristiwa historis masa lalu. Dari realitas tersebut studi ini akan mengkaji kekalahan partai Islam Indonesia dengan mengkaitkan keputusan politik agen pada peristiwa historis masa lalu dalam momen *critical junctures*.

Literature Review

Partai Islam

Dari berbagai kajian terdapat keragaman tentang terminologi partai Islam atau partai Islamis. *Pertama*, partai Islam adalah partai yang bertujuan menerapkan syariat Islam sebagai sumber hukum formal di masyarakat maupun negara, sebagaimana

¹¹ Kikue Hamayotsu, "The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia" dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 30, No. 3 (2011), h.133-159.

¹² Sri Nuryanti, "Masa Depan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)" dalam Moch Nurhasim (ed.), *Op.Cit.*, h.79-115.

¹³ Verdiantika Annisa, "Mengapa Partai Islam Kalah?: Analisis Masalah Organisasi Pada Partai Islam di Indonesia". *Thesis*. (Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2018).

¹⁴ Moch Nurhasim, "Stagnasi Elektoral Partai Persatuan Pembangunan", dalam Moch Nurhasim (ed.), *Op.Cit.*, h. 164-197.

¹⁵ Remy Madinier, *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral* (Jakarta: Penerbit Mizan,2013).

¹⁶ Warjio, *Gagalnya Partai Politik Islam* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018).

¹⁷ John Woinschik & Philipp Muller, "Islamic Parties and Democracy In Indonesia" dalam *Kas International Reports*, No. 10 (2013), h. 59-79.

¹⁸ Lili Romli, "Partai Islam dan Pemilu 2009" dalam *Poelitik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol. 5, No. 1 (2009), h. 444-461, dan "Dinamika Partai Politik Islam di Indonesia Perspektif Historis" dalam Moch. Nurhasim (ed.), *Op.Cit.*, h. 40-78.

¹⁹ Gonda Yumitro, "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.17, No. 1 (2013), h. 35-50.

²⁰ Ken Miichi, "Democratitaton and " Failure" of Islamic Parties" dalam Ken Miichi & Omar Farouk (ed.), *Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization* (London: Palgrave Macmillan, 2015), h. 127-144.

²¹ Syamsudin Haris, "Masa Depan Partai Islam Di Indonesia: Sebuah Analisis Penutup" dalam Moch Nurhasim (ed.), *Op.Cit.*, h. 266-296.

²² Moch Nurhasim, dkk., "Masa Depan Partai Islam Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2 (2016), h. 227-244.

dikonsepkan Masoud.²³ *Kedua*, partai Islam merupakan partai yang menyatakan identitas Islam dengan kesadaran dan tujuan yang disengaja untuk mengembangkan cara hidup Islami serta melayani kepentingan Muslim, seperti konsepsi Salih dan El-Tom. Mereka membagi menjadi partai Islam militan yang menegaskan pengaturan masyarakat Muslim dengan hukum dan yurisdiksi Islam, serta partai Islam moderat yang lebih akomodatif terhadap hukum dan yuridiksi sekuler dalam pengaturan masyarakat Muslim.²⁴ *Ketiga*, partai Islam dibedakan berdasarkan pengaruh budaya masyarakat yaitu *Islamic party* (partai Islamis) dan *culturally influenced Islamic party*, sebagaimana dikonsepkan Saleem. Partai Islamis (*Islamic party*) adalah partai yang program-programnya sangat dipengaruhi doktrin Islam yang umumnya menolak preferensi terhadap setiap denominasi atau tradisi tertentu. Sementara *culturally influenced Islamic party*, merupakan partai yang secara ideologis religius, namun sangat dipengaruhi oleh budaya lokal/nasional dan /atau berakar pada tradisi tertentu.²⁵

Dalam konteks Indonesia terdapat dua jenis yaitu partai Islamis yaitu partai yang secara eksplisit mendasarkan Islam atau bercorak formalistik seperti Ufen,²⁶ Baswedan,²⁷ maupun Sukmajati.²⁸ Kemudian partai Islam-moderat,²⁹ Islam inklusif,³⁰ nasionalis-muslim,³¹ yaitu partai yang mendasarkan ideologi Pancasila namun menggunakan simbol-simbol Islam secara substantif atau bercorak substansialistik. Ada juga yang membedakan partai Islam tradisional, partai Islam modernis, dan partai Islam kelompok Islamis seperti kajian Permata.³² Sedangkan Hamayotsu membagi partai Islam ortodoks, partai Islamis puritan, partai Islam modernis, dan partai

²³ Tarek El-Miselhy Masoud, 2008, *Loc.Cit.*

²⁴ Mohammed Salih & Abdullahi Osman El-Tom, "Introduction" dalam Mohammed Salih (ed.), *Loc.Cit.*

²⁵ Raja M. Ali Saleem, "Identifying Islamic Parties Using Gunther and Diamond's Typology" dalam *SAGE Open* (2014), h. 1-8.

²⁶ Andreas Ufen, "Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation'" dalam *GIGA Working Papers*, No. 37 (2006), h. 1-36.

²⁷ Anies Rasyid Baswedan, "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory" dalam *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5 (2004), h. 669-690.

²⁸ Mada Sukmajati, "How Islamic Parties Organize At The Local Level In Post-Suharto Indonesia : An Empirical Study of Six Major Islamic Parties In The Tasikmalaya District, West Java Province". *Dissertation*. (Heidelberg: Universität Heidelberg, 2011), h. 14.

²⁹ Andreas Ufen, *Loc.Cit.*

³⁰ Anies Rasyid Baswedan, *Loc.Cit.*

³¹ Mada Sukmajati, *Loc.Cit.*

³² Ahmad Norma Permata, "The Prosperous Justice Party (PKS) and Decline of Political Islam in the 2009 Election in Indonesia" dalam Remy Madinier (ed), *Islam and The 2009 Indonesian Election: Political and cultural Issues* (Bangkok: IRASEC, 2010), h. 18-21.

nasionalis religius.³³ Peneliti sendiri mengkategorisasikan partai Islam formalistik yang secara formal mencantumkan Islam sebagai dasar ideologi atau asas partai, dan partai Islam substansialistik-simbolik yang mencantumkan Pancasila sebagai ideologi partai tetapi menggunakan nilai-nilai, jargon atau simbol-simbol Islam dalam aktivitas partai, dan/atau basis massa konstituen utamanya memiliki kedekatan dengan organisasi Islam tertentu.

Kemenangan dan Kekalahan Partai Islam

Seperti lazimnya partai politik, partai Islam juga berusaha meraih kekuasaan dan mengendalikan pemerintahan serta sumber daya politiknya. Dalam konteks inilah mereka masuk ke arena kompetisi politik elektoral.³⁴ Fenomena tersebut mendorong munculnya kajian baik kemenangan maupun kekalahan partai Islam.

Kajian kemenangan partai Islam bisa diklasifikasikan ke dalam dua jenis penjelasan. *Pertama*, penjelasan adaptabilitas partai (*party adaptability*) yang menekankan kapabilitas partai beradaptasi terhadap lingkungan politik eksternal sebagai faktor berpengaruh terhadap kemenangan. Masoud dalam kajiannya menyatakan kemenangan *Ikhwanul Muslimin* bukan oleh faktor kesetiaan massa pendukungnya tetapi kapabilitasnya beradaptasi yang lebih baik daripada para pesaingnya dalam mengatasi tantangan yang dimunculkan sistem politik Mesir, yang disebutnya dengan istilah ekologi elektoral (*electoral ecology*).³⁵

Kedua, penjelasan pelembagaan partai (*party institutionalization*) yang menekankan pelembagaan partai sebagai faktor determinan terhadap kemenangan seperti ideologi, kinerja dan kepemimpinan partai sebagaimana kajian Karakoc dan Gidengil tentang kesuksesan elektoral AKP di Turki.³⁶ Kemudian juga kekokohan dan independensi organisasi, perluasan dan keragaman basis massa, sistem rekrutmen yang mudah dan beragam, aspek kepemimpinan serta strategi pemenangan *vernacular politics*, strategi yang melibatkan kerjasama dengan jejaring masyarakat, partai politik

³³ Kikue Hamayotsu, *Loc.Cit.*

³⁴ Mohammed Salih & Abdullahi Osman El-Tom, *Loc.Cit.*

³⁵ Tarek El-Miselhy Masoud, 2008, *Loc.Cit.*

³⁶ Ekrem Karakoc & Elisabeth Gidengil, *Loc.Cit.*

dan lembaga-lembaga *civil society* dan pemerintahan lokal sebagaimana kajian Soekanto tentang AKP.³⁷

Sedangkan kajian kekalahan partai Islam dapat diklasifikasikan ke dalam empat jenis penjelasan. *Pertama*, penjelasan perilaku memilih (*voting behavior*) yang menekankan aspek perilaku memilih (*voting behavior*) Muslim sebagai faktor penyebab kekalahan seperti tren sekularisasi Muslim yang dikemukakan Mujani dan Liddle, maupun perilaku memilihnya yang semakin rasional sebagaimana ditegaskan Pepinsky, Liddle dan Mujani.

Kedua, penjelasan pelembagaan partai (*party institutionalization*) yang menekankan aspek pelembagaan partai sebagai faktor determinan terhadap kekalahan seperti ketergantungan personal kepada satu figur sentral sebagaimana kajian Hamayotsu terhadap PKB, konflik internal seperti kajian Nuryanti tentang PKB, ketidakefektifan pengelolaan ideologi sebagaimana kajian Nurhasim tentang PPP, serta kajian Anisa mengenai kekalahan partai Islam lokal yang menyimpulkan tiga komponen penting yaitu rumusan misi yang kurang strategis, kegagalan memunculkan figur, dan inkonsistensi nilai. Sedangkan kajian Madinier secara sekilas tentang kekalahan Masyumi mengkaitkan dengan strategi kampanyenya yang terkesan ambigu.³⁸

Ketiga, penjelasan lingkungan politik (*political environment*) yang menekankan kondisi lingkungan politik eksternal seperti intervensi politik rezim sebagaimana kajian Haldun tentang kegagalan *Refah* di Turki, Shahin tentang gagalnya FIS di Aljazair, Norton, Takayuki, mengenai kegagalan *Hizb al-Wasat* mendapatkan legalitas di Mesir, serta Warjio tentang kegagalan Masyumi memperjuangkan formalisasi ideologi Islam. Sementara El-Sherif menjelaskan kegagalan *Ikhwanul Muslim* mempertahankan kemenangannya karena tidak mampu membaca situasi lingkungan politik di Mesir.³⁹ Demikian juga Woischnik dan Muller menjelaskan kegagalan partai-partai Islam era reformasi karena reformasi program partai-partai nasionalis tradisional sekuler yang diorientasikan untuk memungkinkan agama mengambil peran dalam kehidupan politik, membaiknya situasi ekonomi nasional yang lebih berdampak positif terhadap *image* partai nasionalis sekuler, sistem politik dan sistem kepartaian yang kurang

³⁷ Sitoresmi S. Soekanto, *Loc.Cit.*

³⁸ Remy Madinier, 2013, *Loc.Cit.*

³⁹ Ashraf El-Sherif, *The Egyptian Muslim Brotherhood's Failures* (Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2014).

menguntungkan partai Islam, serta gap antara retorika dan aksi partai-partai Islam yang mengurangi daya tarik pemilih Muslim.⁴⁰

Keempat, penjelasan integratif yang mencoba mengintegrasikan berbagai aspek baik internal maupun eksternal yang berpengaruh terhadap kekalahan sebagaimana kajian Romli,⁴¹ Yumitro,⁴² Miichi,⁴³ Haris,⁴⁴ dan Nurhasim.⁴⁵ Faktor internal meliputi organisasi dan kelembagaan, kepemimpinan, fragmentasi dan polarisasi internal, krisis figur sentral, identitas dan disorientasi ideologi, disartikulasi antara pemikiran dan aktualisasi Islam elit partai, ketidakmampuan mewadahi aspirasi pemilih muda Muslim, performa yang identik politik kelompok, serta kinerja elektoral. Sementara faktor eksternal seperti transformasi orientasi politik kaum Muslim, heterogenitas dan fragmentasi kaum Muslim, kecenderungan partai sekuler atau nasional mengadopsi aspirasi kaum Muslim dan menggunakan simbol atau pendekatan kepada kelompok-kelompok Islam, serta perubahan sistem pemilu dan kepartaian khususnya sistem proporsional terbuka.

Path Dependence

Path dependence merupakan salah satu alat analisis dalam institusionalisme historis, sebuah pendekatan varian dari *new institutionalism*. Konsep ini awalnya dikembangkan oleh ilmuwan institusionalisme ekonomi seperti David,⁴⁶ Arthur,⁴⁷ North,⁴⁸ melalui konsep *increasing returns*. Kemudian dikembangkan oleh ilmuwan-ilmuwan sosial lain misalnya Berman,⁴⁹ Goldstone,⁵⁰ dan juga Thelen.⁵¹ Selain itu

⁴⁰ John Woischnik & Philipp Muller, *Loc.Cit.*

⁴¹ Lili Romli, 2009, *Loc.Cit.*

⁴² Gonda Yumitro, *Loc.Cit.*

⁴³ Ken Miichi, *Loc.Cit.*

⁴⁴ Syamsudin Haris, *Loc.Cit.*

⁴⁵ Moch Nurhasim, dkk., 2016, *Loc.Cit.*

⁴⁶ Paul A. David, "Clio and the economics of QWERTY" dalam *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 2 (1985), h. 332–337.

⁴⁷ W. Brian Arthur, *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy* (Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994).

⁴⁸ Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change and Economic Performance* (Cambridge: Cambridge University Press, 1990).

⁴⁹ Sheri Berman, "Path Dependency and Political Action: Re-examining Responses to the Depression" dalam *Comparative Politics*, Vol. 30, No. 4 (1998), h. 379–400.

⁵⁰ Jack A. Goldstone, "Initial Conditions, General Laws, Path-Dependence, and Explanation in Historical Sociology" dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 104, No. 3 (1998), h. 829–845.

⁵¹ Kathleen Thelen, "Historical Institutionalism in Comparative Politics" dalam *Annual Review Political Science*, Vol. 2 (1999), h. 369–404.

Pierson yang mengadaptasi logika *increasing returns*-nya North maupun Arthur ke dalam ilmu politik.⁵²

Dalam perkembangannya konsep *path dependence* ini digunakan secara luas dengan cara yang sangat beragam seperti oleh Mahoney,⁵³ Alexander,⁵⁴ Torfing,⁵⁵ Greener,⁵⁶ Hansen,⁵⁷ Holzinger K. dan C. Knill,⁵⁸ serta banyak lainnya. Dalam kajian partai Islam tercatat misalnya Marzo tentang kontribusi Partai Al Nahda terhadap proses transisi demokrasi di Tunisia.⁵⁹ Dari beragam corak *path dependence* tersebut terdapat similaritas yaitu sejarah adalah penting, bahwa peristiwa tertentu pada masa lalu dapat memiliki efek signifikan terhadap masa kini.

Konsep Critical Junctures

Selain *path dependence* salah satu alat analisa yang sering digunakan dalam pendekatan institusionalisme historis adalah *critical junctures*. Penggunaan awal konsep ini dapat ditemukan dalam karya Lipset dan Rokkan yang menjelaskan asal-usul sistem kepartaian Eropa Barat pada tiga *critical junctures* sebelumnya, yaitu reformasi, revolusi nasional dan revolusi industri.⁶⁰ Konsep ini kemudian dipopulerkan awal tahun 1990-an oleh Collier dan Collier dalam *Shaping the Political Arena* yang mendefinisikan *critical junctures* sebagai periode perubahan signifikan yang secara tipikal terjadi dengan cara berbeda di negara yang berbeda (unit analisis lainnya) dan dihipotesakan

⁵² Paul Pierson, "Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 94, No. 2 (2000), h. 251-267.

⁵³ James Mahoney, "Path Dependence in Historical Sociology" dalam *Theory and Society*, Vol. 28, No. 4 (2000), h. 507-548.

⁵⁴ Gerard Alexander, "Institutions, Path Dependence, and Democratic Consolidation" dalam *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 13, No. 3 (2001), h. 249-270.

⁵⁵ Jacob Torfing, "Path-dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change" dalam *Scandinavian Political Studies*, Vol. 24, No. 4 (2001), h. 277-309.

⁵⁶ Ian Greener, "Understanding NHS Reform: The Policy-transfer, Social Learning, and Path-dependency Perspectives" dalam *Governance*, Vol. 15, No. 2 (2002), h. 161-183.

⁵⁷ Randall Hansen, "Globalization, Embedded Realism, and Path Dependence: The Other Immigrants to Europe" dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 35, No. 3 (2002), h. 259-283.

⁵⁸ Katharina Holzinger & Christoph Knill, "Path Dependencies in European Integration: A Constructive Response to German Foreign Minister Joschka Fischer" dalam *Public Administration*, Vol. 80, No. 1 (2002), h. 125-152.

⁵⁹ Pietro Marzo, "Critical Junctures, Path Dependence and Al-Nahda' Contribution to the Tunisian Transition to Democracy" dalam *The Journal Of North African Studies*, Vol. 24, No. 6 (2019), h. 914-934.

⁶⁰ Seymour M. Lipset & Stein Rokkan, "Cleavege Structures, Party Systems, And Voters Alignments: An Introduction" dalam Seymour M. Lipset & Stein Rokkan (ed.), *Party Systems And Voters Alignments : Cross- National Perspective* (New York: The Free Press, 1967), h. 1-64.

akan menghasilkan warisan yang berbeda.⁶¹ Selain itu mereka menyatakan bahwa durasi *critical junctures* memakan waktu beberapa dekade untuk terjadi.

Sementara itu Mahoney mendefinisikan *critical junctures* yaitu sebagai titik pilihan ketika opsi tertentu diadopsi di antara dua atau lebih alternatif yang ditentukan oleh kondisi historis yang mendahului atau kondisi antesenden. Namun menurutnya hanya titik-titik pilihan yang menutup hasil penting pada masa depan yang merupakan *critical junctures*.⁶² Mahoney juga menyatakan bahwa durasi *critical junctures* merupakan periode waktu yang panjang. Ia menjelaskan bahwa setelah opsi tertentu dipilih dalam momen *critical junctures*, secara progresif akan semakin sulit kembali ke titik awal ketika beberapa alternatif masih tersedia.

Peneliti lain seperti Hogan memperkenalkan gagasan *remoulding* terhadap pendekatan *critical junctures* yaitu bahwa perubahan dalam *critical junctures* harus signifikan, cepat, dan menyeluruh yang definisi operasionalnya akan tergantung pemahaman peneliti terhadap topik tersebut.⁶³ Selain Hogan yang berpendapat durasi waktu *critical junctures* merupakan periode singkat adalah Capoccia dan Kelemen. Namun mereka senada dengan Mahoney, mereka memandang pentingnya peran pilihan agen dalam momen *critical junctures*.⁶⁴

Konsep Path Dependence dan Critical Junctures James Mahoney

Mahoney mengkonseptualisasi *path dependence* dalam karyanya *Path Dependence in Historical Sociology* yang memiliki tiga corak. *Pertama*, melibatkan studi proses kausal yang sangat sensitif terhadap peristiwa yang terjadi pada tahap awal dari keseluruhan urutan historis. *Kedua*, dalam *path dependence sequence*, peristiwa historis awal merupakan peristiwa kontingensi yang tidak dapat dijelaskan atas dasar peristiwa sebelumnya atau kondisi awal. Karena itu peristiwa-peristiwa historis awal ini sangat penting terhadap urutan hasil akhir atau *final outcome*, sehingga mengesampingkan kemungkinan memprediksi suatu hasil akhir atau *final outcome*

⁶¹ Ruth Berins Collier & David Collier, *Shaping The Political Arena: The Labor Movement, And Regime Dynamics In Latin America* (Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002).

⁶² James Mahoney, "Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective" dalam *Studies in Comparative International Development*, Vol. 36, No. 1 (2001a), h. 111-141.

⁶³ John W. Hogan, "Remoulding the Critical Junctures Approach" dalam *Canadian Journal of Political Science*, Vol.39, No.3 (2006), h. 657-679.

⁶⁴ Giovanni Capoccia & R. Daniel Kelemen, "The Study of Critical Junctures Theory, Narrative, and Counterfactuals In Institutional Analysis" dalam *World Politics*, Vol. 59, No.3 (2007), h. 341-369.

berdasarkan kondisi awal. *Ketiga, path-dependence sequences* ditandai dengan pola kausal yang relatif deterministik atau “*inertia*”, yaitu begitu proses yang ditetapkan mulai melangkah dan melacak hasil atau *outcomes* tertentu, proses ini cenderung untuk tetap bergerak dan melacaknya.⁶⁵

Berbeda dengan Pierson dan para peneliti ekonomi kelembagaan lainnya, Mahoney menawarkan tipe *reactive sequences* selain *self-reinforcing sequences* dalam *path-dependence sequences*. Dalam *self-reinforcing sequences* menurutnya, *inertia* melibatkan mekanisme reproduksi pola kelembagaan tertentu dari waktu ke waktu. Sedangkan dalam *reactive sequences*, *inertia* melibatkan mekanisme reaksi dan kontra reaksi yang memberikan rantai peristiwa suatu “logika inheren” yaitu peristiwa “secara natural” mengarah kepada peristiwa lain.

Dalam karya lainnya, *The Legacies of Liberalism Path Dependence and Political Regimes in Central America*,⁶⁶ dan *Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective*,⁶⁷ Mahoney mengaplikasikan konsep *path dependence* dengan *critical junctures* ketika mengkaji perubahan rezim di lima negara Amerika Latin yaitu Guatemala, El-Salvador, Nikaragua, Honduras, dan Kosta Rika. Ia mendefinisikan *path dependence* sebagai suatu tipe penjelasan tertentu yang mengungkapkan melalui serangkaian tahapan yang berurutan. Titik awal dari rumusan *path dependence* Mahoney adalah *antecedent historical condition* atau kondisi antesenden, yaitu kondisi yang menentukan serangkaian opsi yang tersedia bagi aktor ke sebuah titik pilihan penting yaitu *critical junctures*. Dalam konsepsinya *critical junctures* ditandai proses pemilihan opsi tertentu diantara dua atau lebih alternatif. Pilihan tersebut sangat krusial karena berimplikasi terhadap proses pembentukan sebuah *structural persistence* yaitu pola kelembagaan atau pola struktural yang persisten dan memicu *reactive sequence* ketika aktor merespons pengaturan kelembagaan yang ada melalui serangkaian respon dan reaksi balik yang dapat diprediksi. Reaksi-reaksi ini kemudian menghubungkan perkembangan sampai kepada *outcome* atau hasil yang merupakan resolusi terhadap konflik yang menandai serangkaian reaksi yang ada.⁶⁸

⁶⁵ James Mahoney, 2000, *Loc.Cit.*

⁶⁶ James Mahoney, *The Legacies of Liberalism Path Dependence and Political Regimes in Central America* (Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001b).

⁶⁷ James Mahoney, 2001a, *Loc.Cit.*

⁶⁸ James Mahoney, 2000, *Loc.Cit.*

Model Step-Wise Critical Juncture and Path Dependence Repetition

Dalam penelitiannya mengenai kebijakan perencanaan kota dan perumahan di Kawasan Metropolitan Seoul, Korea Selatan, Choia, Lee, Kim, serta Seong mengajukan *step-wise critical juncture and path dependence repetition model*. Model tersebut mendefinisikan kedua istilah secara saling terkait yaitu *path dependence* sebagai kecenderungan ketika efek dari sebuah keputusan historis atau kebijakan dalam waktu yang relatif singkat di-*reinforced* dan bertahan selama suatu periode yang relatif lama, dan *critical juncture* merupakan periode singkat ketika suatu kekuatan politik dalam situasi kontingensi membuat sebuah keputusan penting.⁶⁹

Mereka menyarankan empat kriteria, yaitu; *Pertama*, situasi kontingensi, yaitu situasi yang memotivasi aktor mengambil opsi keputusan penting pada periode *critical juncture* merupakan situasi yang bersifat kontingensi. *Kedua*, durasi *critical juncture* merupakan periode waktu yang relatif singkat, tetapi di sisi lain durasi waktu satu *path dependence* relatif lama. *Ketiga*, yaitu adanya alternatif-alternatif yang memungkinkan terhadap keputusan yang dibuat pada periode *critical juncture*. *Keempat*, dalam suatu periode *path dependence* harus ada proses *reinforcement*.⁷⁰

Namun model Choia, Lee, Kim, serta Seong ini hanya membatasi corak *path dependence* tipe *reinforcement* saja sehingga peneliti memodifikasi dengan penambahan tipe *reactive sequences* konsepnya Mahoney. Dengan demikian *path dependence* bisa merupakan proses *reinforcement* atau *self-reinforcing sequences* maupun *reactive sequences*.

Path Dependence Repetition Kekalahan Partai Islam Indonesia

Partai Islam Indonesia yang memiliki akar historis yang panjang sejak pra kemerdekaan, senantiasa mengalami kekalahan dalam kontestasi pemilu legislatif yang digelar. Kekalahan mereka sepanjang lintasan politik sejak pemilu 1955 hingga 2019 merupakan *path dependence repetition* yaitu meliputi tiga proses *path dependence* yang masing-masing dipicu oleh momen *critical junctures* berupa keputusan politik yang ditetapkan agen partai Islam pada masa lalu dari berbagai alternatif politik yang

⁶⁹ Chang Gyu Choia, Sugie Lee, Heungsoon Kim & Eun Yeong Seonga, "Critical Junctures and Path Dependence in Urban Planning and Housing Policy: A review of greenbelts and New Towns in Korea's Seoul Metropolitan Area" dalam *Land Use Policy*, Vol. 80 (2019), h. 195–204.

⁷⁰ *Ibid.*

ditentukan kondisi antesenden atau peristiwa historis sebelumnya. Momen tersebut kemudian memicu serangkaian urutan peristiwa kausal yang meletakkan partai Islam ke dalam jalur perkembangan tertentu yang bermuara kepada hasil akhir atau final *outcome* kekalahan pemilu legislatif pada setiap periode politik.

Keputusan Masyumi Menetapkan Menteri Agama dari Non NU

Momen *critical juncture* pertama terjadi tahun 1952 ketika agen Masyumi, yang dikomandoi Natsir dan kelompoknya, menetapkan KH Faqih Usman dari kalangan Muhammadiyah sebagai menteri agama dari calon-calon alternatif yang ada, termasuk calon yang diusulkan unsur Nahdlatul Ulama (NU).⁷¹ Alternatif-alternatif dalam momen tersebut ditentukan oleh dua kondisi antesenden. Pertama adalah perubahan *setting* kelembagaan khususnya *rule of the game* dalam Masyumi pasca terpilihnya Natsir sebagai ketua tahun 1949 terkait pembatasan otoritas politik Majelis Syuro.⁷² Upaya tersebut nampaknya tidak lepas dari pengaruh lingkungan kelembagaan (*institutional environment*) eksternal yaitu gerakan modernisme Islam tempat Natsir tumbuh dan berkembang ketika menjadi anggota Persis, organisasi Islam yang sangat dipengaruhi pemikir Islam Timur Tengah Muhammad Abduh.⁷³ Hal ini berkontribusi terhadap sikap Natsir dan kelompoknya dari Islam modernis yang apriori dengan kapabilitas ulama NU yang mayoritas berlatar belakang pendidikan keagamaan tradisional. Kondisi ini menentukan kemunculan alternatif untuk menetapkan menteri agama dari kalangan Islam modernis di luar NU.

Penataan kelembagaan yang dilakukan Natsir memicu kondisi antesenden kedua yaitu upaya NU membentuk MPP (Majelis Pertimbangan Politik) tahun 1951 sebagai antisipasi pembentukan partai independen.⁷⁴ Pembentukan MPP berpengaruh terhadap keberanian agen politik NU, khususnya KH Wahab Hasbullah, memunculkan opsi penarikan diri dari Masyumi dalam tarik ulur jabatan menteri agama pada momen *critical junctures* tahun 1952.

⁷¹ Greg Fealy, *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967* (Yogyakarta: LKiS, 2003), h. 110. Lihat juga Robin Bush, *Nahdlatul Ulama and The Struggle for Power Within Islam and Politics In Indonesia* (Singapore: ISEAS, 2009).

⁷² Greg Fealy, *Op.Cit.*, h. 100-102.

⁷³ Terkait gerakan pembaharuan Islam Persis, lihat Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, (Jakarta: LP3ES, 1980), h. 95-102.

⁷⁴ Greg Fealy, *Op.Cit.*, h. 100.

Tarik ulur penentuan jabatan menteri agama di internal Masyumi muncul ketika unsur Muhammadiyah menginginkan rotasi jabatan di luar NU dan menyodorkan KH Faqih Ustman. Sementara NU merasa jabatan tersebut merupakan posisi yang sudah semestinya diberikan kepada kadernya sehingga mendorong KH Wahab Hasbullah, Rais Aam PBNU sekaligus Ketua Majelis Syuro Masyumi, melakukan berbagai manuver politik.⁷⁵ Natsir dan kalangan Islam modernis yang memiliki pengaruh determinan dalam partai lebih cenderung memberikan dukungan kepada KH Faqih Usman daripada calon NU yang dianggap kurang memiliki kapabilitas pasca KH Wahid Hasyim menyatakan ketidaksediaannya.⁷⁶

Keputusan politik agen partai Masyumi tersebut dipengaruhi oleh beberapa factor, yakni; *Pertama*, *setting* kelembagaan di internal Masyumi tahun 1949 yang membatasi otoritas majelis syuro sehingga memberi diskresi agen-agen partai dalam proses pengambilan keputusan politik. *Kedua*, dominasi kelompok Natsir dalam Masyumi sejak 1949, mengacu kategorisasi Feith merupakan *administrators*, yaitu berpendidikan Barat, menguasai teknik dan skill profesional, perkotaan dan berorientasi modern sehingga kurang begitu merasa membutuhkan *solidarity maker*, yaitu pemimpin tradisional kharismatik yang memiliki kapabilitas memobilisasi massa dan dukungan mengakar.⁷⁷ *Ketiga*, meminjam teori *bounded rationality* Simon,⁷⁸ agen partai Masyumi tidak memiliki informasi lengkap terkait kesiapan dan potensi kekuatan politik NU untuk menjadi partai yang independen. Akibatnya ultimatum KH Wahab tidak dijadikan referensi. Sebagaimana dinyatakan Fealy bahwa keputusan DPP Masyumi merupakan kesalahan kalkulasi fatal kelompok Natsir karena menyakini kecil kemungkinan NU keluar diri dari Masyumi dan diprediksi hanya akan menjadi *jam'iyah* (organisasi).⁷⁹

Pasca momen *critical juncture* memicu proses *reactive sequences*. Proses pertama adalah keputusan NU untuk keluar dari Masyumi dalam Mukhtamar NU di Palembang 1952 sebagai manifestasi kekecewaan organisasi itu terhadap keputusan politik Masyumi. Keluarnya NU memicu proses *reactive sequences* berikutnya yaitu

⁷⁵ *Ibid.* h. 108.

⁷⁶ *Ibid.* h. 100-102.

⁷⁷ Herbert Feith, *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia* (Ithaca New York: Cornell University Press, 1962).

⁷⁸ Herbert A. Simon, "Theoris of Bouded Rationality" dalam C..B. McGuire & Roy Redner (ed.), *Decision and Organization: A Volume in Honor of Jacob Marschak* (Amsterdam, NL: North-Holland Publishing Company, 1972), h. 161-176.

⁷⁹ Greg Fealy, *Op.Cit.*, h. 99-100

pembentukan Liga Muslim Indonesia (LMI) yang diinsiasi NU pada 30 Agustus 1952 dengan merangkul partai Islam lain seperti PSII dan PERTI serta organisasi sosial di Sulawesi Selatan *Dar al-Da'wah wal-Irsyad* dan Persyarikatan Tionghoa Islam Indonesia.⁸⁰ LMI mampu menggoyahkan pengaruh politik Masyumi. Hal ini terlihat ketika PNI gagal membangun koalisi dengan Masyumi kemudian mengalihkan ajakan bermitra kepada LMI dalam Kabinet Ali Sastroamidjojo.⁸¹

Rangkaian urutan peristiwa *reactive sequences* itu mengunci atau *lock-in* partai Islam ke dalam jalur pembelahan (*cleavage*) yang berpengaruh terhadap *outcome* atau hasil kekalahan pemilu 1955. Pada pemilu DPR tanggal 29 September 1955, Masyumi secara mengejutkan hanya menduduki posisi *runner up* di bawah PNI (Partai Nasional Indonesia) yang meraih 22,32% suara, baru disusul Masyumi dengan 20,92% diikuti NU dengan 18,41% yang mengungguli PKI yang meraih 16,36%. Sementara PSII dan PERTI masing-masing hanya mendapat 8 dan 4 kursi, serta PPTI dan AKUI masing-masing 1 kursi.⁸² Kekalahan partai Islam terulang pada pemilu Badan Konstituante tanggal 15 Desember 1955 yang kembali dimenangkan PNI. Bahkan Masyumi suaranya turun kurang lebih 100 ribu dan hanya memperoleh 112 kursi kalah dari PNI dengan 119 kursi. Sementara NU meskipun naik suaranya dan mendapat 91 kursi tetapi tetap pada posisi tiga besar.⁸³

Dalam perspektif analisis *path dependence* hasil pemilu tahun 1955 tersebut merupakan *outcome* atau hasil yang tidak bisa dilepaskan dari serangkaian urutan peristiwa kausal sebelumnya. Artinya kekalahan partai Islam dalam pemilu ini merupakan hasil dari efek kausal keputusan politik agen pada masa lalu, yaitu momen *critical juncture*, ketika agen partai Masyumi mengabaikan tuntutan NU dalam posisi menteri agama pada tahun 1952.

Upaya Formalisasi Piagam Djakarta pada Sidang Konstituante Tahun 1959

Momen *critical juncture* kedua ditandai keputusan politik agen-agen partai yang tergabung dalam faksi Islam memperjuangkan formalisasi Piagam Djakarta pada Sidang

⁸⁰ Deliar Noer, *Partai Islam di Pentas Nasional: 1945-1965* (Jakarta: PT Puska Utama Grafiti, 1987), h. 94-95.

⁸¹ Remy Madinier, 2013, *Op.Cit.*, h. 129.

⁸² Mengenai hasil lengkap pemilu DPR tahun 1955 juga bisa lihat juga Muhammad Asfar, *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004* (Surabaya: Pustaka Eureka, 2006).

⁸³ Remy Madinier, *Op.Cit.*, h. 202.

Konstituante tahun 1959. Alternatif-alternatif dalam momen itu ditentukan oleh dua kondisi antesenden. Pertama *setting* kelembagaan (*institutional setting*) pada 1950 dengan kembalinya format negara kesatuan dan ditetapkannya UUDS 1950 sebagai konstitusi negara sementara. Konsekuensi perubahan tersebut adalah pembentukan Badan Konstituante melalui pemilu 1955 yang ditugaskan memformulasikan dan menetapkan konstitusi negara yang baru sehingga memberi ruang munculnya upaya formalisasi Islam pada Sidang Konstituante 1956-1959 yang berakhir *deadlock*. Peristiwa tersebut memicu kondisi antesenden kedua yaitu upaya Soekarno melakukan intervensi politik dengan mengajak Konstituante kembali kepada UUD 1945 sekaligus mewujudkan obsesi politiknya Demokrasi Terpimpin menggantikan demokrasi parlementer. Langkah Soekarno dilakukan dengan penyampaian pidato di depan badan tersebut pada 24 April 1959 dengan judul *Res Publica, Sekali Lagi Res Publica*.⁸⁴ Peristiwa ini menentukan munculnya alternatif untuk kembali kepada UUD 1945 dengan dasar Pancasila.

Namun ajakan Soekarno ditolak agen-agen partai Islam di Badan Konsituante. Mereka hanya bersedia menerima UUD 1945 jika Piagam Djakarta dilegalkan kembali dengan pencantuman tujuh kata-kata yang pernah dieliminir dari Sila Pertama Pancasila dan Pasal 29.⁸⁵ Penolakan tersebut membawa implikasi persidangan Badan Konstituante harus berlanjut melalui *voting* namun gagal memenuhi dukungan minimal 2/3 suara, baik kubu Islam maupun kubu Pancasila, sehingga terjadi *deadlock*.

Momen *critical juncture* tersebut kemudian mengarahkan proses *structural and institutional persistence* yang bertujuan memarginalkan partai politik termasuk partai Islam. Diawali ditetapkannya Dekrit Presiden oleh Soekarno pada 5 Juli 1959 yang menyatakan tidak berlakunya UUDS 1950, mengukuhkan kembali UUD 1945 serta pembubaran Badan Konstituante.⁸⁶ Kemudian Penpres No. 7 Tahun 1959 yang mencabut Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 serta menetapkan syarat-syarat dan penyederhanaan kepartaian.⁸⁷ Kebijakan tersebut diperkuat dengan Perpres

⁸⁴ Ahmad Syafii Maarif, *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante* (Jakarta : LP3ES, 2006), h. 182.

⁸⁵ Muchamad Ali Safa`at, "Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik (1959 – 2004)". *Disertasi*. (Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), h. 145

⁸⁶ Ahmad Syafii Maarif, *Op.Cit.*, h. 179.

⁸⁷ Muchamad Ali Safa`at, *Loc.Cit.*

No. 13 Tahun 1960 tentang Pengakuan, Pengawasan, dan Pembubaran Partai Politik, kemudian diubah menjadi Perpres No. 25 Tahun 1960.⁸⁸ Langkah pembubaran dilakukan Soekarno pada 17 Agustus 1960 dengan Keppres No. 200 Tahun 1960 tentang pembubaran Masyumi dan Keppres No. 201 Tahun 1960 mengenai pembubaran PSI. Keduanya dianggap tidak memenuhi Penpres No. 7 Tahun 1959,⁸⁹ dan elit-elit mereka dituduh terlibat aksi PRRI Semesta.⁹⁰ Melalui Keppres No. 128 Tahun 1961 Soekarno mengakui legalitas NU, PSII Arudji, PNI, PKI, Partai Katolik, Partai Indonesia (Partindo), Partai Murba, dan IPKI.⁹¹ Tetapi ia menolak legalitas PSII Abikusno PRN Bebas, PRI, dan PRN Djody melalui Keppres No. 129 Tahun 1961. Soekarno juga mengakui PERTI dan Parkindo melalui Keppres No. 440 Tahun 1961,⁹² tetapi membekukan Murba dengan Keppres No. 291 Tahun 1965.⁹³ Rangkaian kebijakan tersebut mengindikasikan proses *self reinforcing sequences* mengacu pendapat Mahoney,⁹⁴ atau *reinforcement* meminjam konsepsi Choia dan kawan-kawan.⁹⁵

Ketika kekuasaan beralih kepada Soeharto sejak tahun 1966, kebijakan tersebut dipertahankan meskipun dengan corak yang berbeda. Dua warisan krisis yaitu bidang ekonomi maupun politik,⁹⁶ mendorong Soeharto lebih memprioritaskan kebijakan pembangunan ekonomi dan stabilitas politik, dan memandang perlu penyederhanaan partai politik.⁹⁷ Diawali Soeharto dengan menjadikan Sekber-Golkar, yang kemudian dikenal dengan Golkar, sebagai mesin politik utama rezim.⁹⁸ Kemudian menetapkan Permendagri No. 12 Tahun 1969 yang melarang seluruh pegawai negeri aktif di partai politik dan mewajibkan bergabung ke dalam Korps Karyawan Kementerian Dalam

⁸⁸ *Ibid.* hal. 159-160

⁸⁹ *Ibid.* hal 168.

⁹⁰ Lihat Remy Madinier, 2013, *Loc.Cit.*

⁹¹ *Ibid.* Masyumi dan PSI dinyatakan sebagai partai terlarang karena dianggap tidak memenuhi perturan dalam Penpres Nomor 7 Tahun 1959 khususnya tuduhan memiliki hubungan dengan pemberontakan PRRI Semesta.

⁹² Muchamad Ali Safa`at, *Op.Cit.*, h. 161.

⁹³ *Ibid.* h.172-173.

⁹⁴ *Ibid.* h. 507-548.

⁹⁵ Chang Gyu Choia, Sugie Lee, Heungsoon Kib & Eun Yeong Seonga, *Loc.Cit.*

⁹⁶ Abdul Aziz Thaba, *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru* (Yogyakarta : Gema Insani Pres, 1996), h. 186.

⁹⁷ Valina Singka Subekti, *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h.75

⁹⁸ Harold Crouch, *Militer dan Politik di Indonesia* (Jakarta: Sinar Harapan, 1986), h. 245.

Negeri (Kokarmendagri), serta PP No. 6 tahun 1970 yang menuntut monoloyalitas kepada Golkar.⁹⁹

Langkah lanjutan dilakukan Soeharto dengan menolak pendirian kembali Masyumi pada Januari 1966.¹⁰⁰ Presiden juga menolak Parmusi yang dibentuk aktivis Islam pasca gagal mendirikan Masyumi karena dilibatkannya Moehammad Roem sebagai ketua. Pemerintah baru bersedia memberikan legalitas terhadap kepemimpinan Djarnawi Kusumo dan Lukman Harun di Parmusi. Namun ketika terjadi konflik internal di partai itu pemerintah melakukan intervensi dengan penunjukan H.M.S Mintaredja sebagai Ketua Umum.¹⁰¹

Upaya lain dilakukan dengan mendesain pemilu dari regulasi hingga petugas di TPS (tempat pemungutan suara) untuk kepentingan pemenangan Golkar.¹⁰² Desain pemilu pertama ditetapkan tahun 1969 yaitu UU No. 15 Tahun 1969. Kemudian memberi ruang politik bagi militer terlibat dalam parlemen melalui UU No. 16 Tahun 1969 tentang susunan keanggotaan MPR, DPR, dan DPRD. Melalui regulasi tersebut ABRI mendapat porsi 100 kursi di DPR serta pengangkatan 1/3 dari jumlah anggota MPR dari unsur ABRI dan utusan golongan.¹⁰³ Berbagai kebijakan tersebut sangat efektif mengantarkan Golkar sebagai pemenang pemilu pertama 1971.¹⁰⁴

Soeharto kemudian memaksakan fusi partai politik termasuk partai Islam. Pada 5 Januari 1973 fusi partai Islam terwujud dengan kesepakatan lima tokoh yaitu KH Idham Kholid (NU), HMS Mintaredja (Parmusi), H. Anwar Tjokroaminoto (PSII), Rusli Hali (PERTI) dan KH Masjkur (NU) bergabung dalam satu wadah politik Partai Persatuan Pembangunan (PPP).¹⁰⁵ Kebijakan tersebut diperkuat dengan kebijakan *floating mass* (massa mengambang) yang bertujuan membatasi kepengurusan partai politik di level *grass roots* yaitu hanya diperbolehkan sampai tingkat kabupaten kecuali

⁹⁹ Leo Suyadinata, *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik* (Jakarta: LP3ES, 1992), h.45.

¹⁰⁰ Abdul Aziz Thaba, *Op.Cit.*, h. 246

¹⁰¹ *Ibid.* h. 247.

¹⁰² Sedangkan mengenai pemilu-pemilu Orde Baru lihat R. William Liddle, *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik* (Jakarta: LP3ES, 1982).

¹⁰³ Muchamad Ali Safa`at, *Op.Cit.* h. 102.

¹⁰⁴ Parmusi meskipun perolehan suaranya lebih kecil dari PNI, tetapi untuk perolehan kursi DPR lebih besar, yaitu 24, sementara PNI 20 kursi. Untuk hasil pemilu 1977 lihat R. William Liddle, 1982, *Loc.Cit.*

¹⁰⁵ *Ibid.* h. 93-94.

Golkar.¹⁰⁶ Namun kemudian diakomodasi dengan keberadaan seorang komisaris di kecamatan yang dibantu beberapa orang. Kebijakan ini dilegalkan melalui UU No. 3 Tahun 1975 sekaligus penetapan fusi partai dan pembatasan jumlah partai.¹⁰⁷ Dua kebijakan tersebut berkontribusi terhadap kinerja partai Islam pada pemilu 1977 dan pemilu 1982.

Upaya lainnya adalah proses deideologisasi melalui kebijakan asas tunggal Pancasila dengan ditetapkannya UU No. 3 tahun 1985 tentang partai politik dan Golkar.¹⁰⁸ Dengan kebijakan tersebut PPP harus menanggalkan asas Islam dengan Pancasila dan mengganti gambar *Ka'bah* dengan bintang pada pemilu 1987. Akibatnya PPP kehilangan instrumen ideologi untuk menarik basis konstituennya dari kalangan Islam di level *grass roots*.¹⁰⁹ Pasca kebijakan tersebut suara PPP mengalami kemerosotan tajam pada pemilu 1987.¹¹⁰ Meskipun hal tersebut juga disebabkan keluarnya NU dari PPP tahun 1984 akibat konflik internal dengan unsur Parmusi.

Proses *structural and institutional persistence* dalam rangka marginalisasi partai politik termasuk partai Islam mampu mengantarkan kemenangan Golkar dalam semua kontestasi pemilu era Orde Baru. Pada pemilu pertama 1971, Golkar mampu memperoleh suara mutlak 62, 82% jauh dari perolehan suara empat partai Islam yang masih eksis yaitu NU, Parmusi, PERTI, dan PSII.¹¹¹

Bersatunya empat partai Islam ke dalam satu wadah PPP melalui fusi partai tahun 1973 juga tidak berimplikasi signifikan terhadap suara mereka dalam pemilu 1977 karena hanya meraih 29,29%.¹¹² Ketidakberdayaan partai Islam diperparah oleh konflik internal partai Islam sejak awal 1980-an dan memuncak dengan keluarnya NU tahun

¹⁰⁶ Sudarnoto Abdul Hakim, "The Partai Persatuan Pembangunan: Political Journey of Islam under Indonesia's New Order (1973-1997)". *Thesis*. (Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1993), h. 40.

¹⁰⁷ Muchamad Ali Safa`at, *Op.Cit.* h. 211.

¹⁰⁸ *Ibid.* h. 213.

¹⁰⁹ Ridho Al-Hamdi, *Partai Politik Islam Teori dan Praktik Politik di Indonesia* (Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013), h. 85.

¹¹⁰ M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra & Adi Prayitno, *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PP dan PKS* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019), h. 91.

¹¹¹ Muhammad Asfar, *Op.Cit.*, h. 76.

¹¹² Tentang suara PP dalam pemilu Orde Baru tahun 1970-an, lihat Arief Mudatsir Mandan, *Krisis Ideologi: Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus ,Penerapan Ideologi Islam PPP* (Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009).

1984.¹¹³ Imbasnya pemilu 1982 suara PPP turun menjadi 27,98%. Kemerosotan terbesar terjadi pada pemilu 1987 pasca keluarnya NU dari PPP yaitu hanya 15,97% suara. PPP baru mengalami peningkatan pada pemilu 1992 menjadi 17,01%, serta pemilu 1997 karena mendapat limpahan suara pendukung Megawati di PDI yang menolak kepemimpinan Surjadi dukungan Soeharto melalui fenomena "Mega Bintang" sehingga naik menjadi 22,43%. Meskipun demikian kenaikan suara tersebut jauh sekali dari capaian suara Golkar.¹¹⁴

Kekalahan partai Islam sepanjang era Orde Baru merupakan *outcome* atau hasil yang disebabkan serangkaian kebijakan dalam proses *setting* kelembagaan berupa tekanan politik rezim. Tekanan tersebut tidak lepas dari peristiwa historis masa lalu dalam momen *critical junctures* yaitu keputusan politik yang dibuat agen-agen partai Islam pada Sidang Konstituante tahun 1959 yang menolak kembali UUD 1945 dan melanjutkan perjuangan formalisasi Piagam Djakarta. Dengan demikian ini mengindikasikan efek kausal keputusan politik agen dalam momen *critical juncture* berkontribusi terhadap penyebab kekalahan partai Islam pada era Orde Baru.

Pendirian Partai-Partai Islam Baru Tahun 1998

Momen *critical juncture* ketiga adalah keputusan politik agen partai mendirikan partai-partai Islam baru pada awal reformasi 1998. Terdapat 42 partai Islam yang eksis dan 35 di antaranya terdaftar secara legal di Departemen Kehakiman, namun demikian hanya 20 partai yang berhasil memenuhi syarat berkompetisi pada pemilu legislatif 1999.¹¹⁵ Alternatif-alternatif dalam momen *critical juncture* tersebut tidak lepas dari dua kondisi antesenden. Pertama ialah liberalisasi pemikiran politik Islam yang berkembang sejak tahun 1970 dimotori Nurcholis Madjid melalui salah satu jargonnya *Islam Yes, Partai Islam No.*¹¹⁶ Kemunculan gerakan ini tidak lepas *setting* kelembagaan (*institutional setting*) Orde Baru yang represif terhadap ekspresi politik Islam

¹¹³ Tentang keluarnya NU lihat, Kacung Maridjan, *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 1992); Abdul Gaffar Karim, *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1995); Einar Martahan Sitompul, *NU dan Pancasila* (Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996); Robin Bush, *Loc.Cit.*

¹¹⁴ Tentang hasil Perolehan suara PPP selama pemilu Orde Baru lihat Muhammad Asfar, *Loc.Cit.*; Lili Romli, 2016, *Loc.Cit.*; M. Amin Nurdin, Ali Thaufan Dwi Saputra & Adi Prayitno, *Op.Cit.*, h. 87-94.

¹¹⁵ Ridho Al-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 95.

¹¹⁶ Nurcholis Madjid, "Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat" dalam Nurcholis Madjid, dkk., *Pembaharuan Pemikiran Islam* (Jakarta: Islamic Research Centre, 1970), h. 1-12.

formalistik sehingga memaksa aktivis Islam merubah strategi perjuangan politiknya dengan menanggalkan formalisme Islam.¹¹⁷ Namun gerakan ini baru menemukan gaungnya pada tahun 1980 seiring munculnya intelektual Muslim baru yang menyuarakan pemikiran politik Islam substansialistik seperti Harun Nasution,¹¹⁸ Munawir Sjazali,¹¹⁹ dan Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.¹²⁰ Hal ini juga tidak lepas dari *setting* kelembagaan (*institutional setting*) Orde Baru yang meretriksi Islam politik tetapi di sisi lain memprioritaskan pembangunan ekonomi sehingga berkontribusi melahirkan kelas intelektual Islam baru tahun 1980-an.¹²¹ Pembaruan pemikiran Islam ini semakin berkembang tahun 1990-an dengan kemunculan tokoh-tokoh intelektual kampus serta aktivis-aktivis sosial Muslim khususnya di Jakarta dan Yogyakarta.¹²² Kondisi ini menentukan alternatif-alternatif dalam momen *critical juncture* tentang aktualisasi dan ekspresi politik Islam yang beragam dan tidak monolitik pada awal reformasi 1998.

Kondisi antesenden kedua adalah *setting* kelembagaan (*institutional setting*) pasca lengsernya Soeharto dengan lahirnya kebijakan liberalisasi politik yang dicetuskan Habibie diantaranya kebebasan pendirian partai politik. Kebijakan tersebut menentukan munculnya berbagai alternatif antara mempertahankan dan memperkuat partai Islam lama yaitu PPP, sebagai wadah tunggal perjuangan politik umat Islam, atau membentuk wadah tunggal baru, ataukah membentuk wadah perjuangan politik umat Islam sesuai dengan kepentingan dan orientasi politik mereka.

Momen *critical junctures* ketiga selain menyebabkan terpolarisasinya kekuatan politik Islam juga berkontribusi menciptakan sistem kepartaian yang *oversize*, yaitu terdapat 184 partai dari beragam ideologi yang berdiri dan 141 partai diantaranya

¹¹⁷ Bahtiar Efendy, *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia* (Jakarta: Paramadina, 2009), h. 162-163.

¹¹⁸ Yusril Ihza Mahendra, "Harun Nasution dan Pemikiran Politik Islam: Tentang Islam dan Masalah Negara", dalam Harun Nasution (ed.), *Refleksi Pembabaruan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution* (Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989), h. 220

¹¹⁹ Bahtiar Effendy, "Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali and the Development of a New Theological Underpinning of Political Islam" dalam *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 2 (1995), h. 97-121.

¹²⁰ Abdurrahman Wahid, "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari & Abdul Mun'im Saleh (ed.), *Islam Indonesia Menatap Masa Depan* (Jakarta : P3M, 1989), h. 81-85.

¹²¹ M. Syafi'i Anwar, *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawaan Muslim Orde Baru* (Jakarta: Paramadina, 1995), h. 128.

¹²² Zuly Qodir, *Islam Liberal* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003), h. 62-63. Lihat juga Agus Riyanto, "Wacana Islam Liberal: Analisis Wacana Tulisan-Tulisan di www.Islib.com". *Tesis*. (Yogyakarta : Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, UGM, 2006), h. 51-61.

mendapatkan legalitas dari Departemen Kehakiman.¹²³ Fenomena ini memicu proses *structural and institutional persistence* yang ditandai *reinforcement* atau *self reinforcing sequences* dalam rangka penyederhanaan kepartaian.

Diawali era kepemimpinan Megawati dengan penetapan UU No. 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik dan UU No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum legislatif yang menambah persyaratan pendirian partai politik dan kepesertaan pemilu 2004.¹²⁴ Regulasi ini efektif memfilter peserta pemilu 2004 yang turun menjadi 24 partai termasuk 7 partai Islam yaitu PKB, PPP, PKS, PAN, PBB, PBR dan PPNUI.¹²⁵ Kebijakan lainnya adalah menaikkan *electoral threshold* menjadi 3% memperkuat kebijakan era Habibie. Kebijakan ini menyebabkan hanya 4 partai Islam dari 7 partai Islam yang lolos memenuhi *electoral threshold* 3% yaitu PKB, PPP, PAN, dan PKS.¹²⁶

Penyederhanaan partai kembali diperkuat pada masa Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui UU No.2 Tahun 2008 tentang partai politik dan UU No. 10 Tahun 2008 tentang pemilu legislatif dengan memperberat persyaratan pendirian partai dan kepesertaan dalam pemilu 2009.¹²⁷ Akibatnya hanya 38 partai yang dinyatakan lolos verifikasi oleh KPU, termasuk 9 partai Islam yakni PKS, PAN, PPP, PKB, PBB, PKNU, PBR, PMB, dan PPNUI.¹²⁸ Era ini juga ditandai perubahan regulasi *electoral threshold* kepada *parliamentary threshold* 2,5% yang cukup efektif memfilter jumlah partai di parlemen yaitu dari 38 partai politik hanya 9 partai yang berhak menempatkan wakilnya. Sementara dari 7 partai Islam yang ikut pemilu 2009 hanya 4 partai yang lolos yaitu PKS, PAN, PPP, dan PKB.¹²⁹

Pada kepemimpinan SBY periode kedua penyederhanaan kepartaian ditandai penetapan UU No. 2 Tahun 2011 tentang partai politik dan UU No. 08 Tahun 2012 tentang pemilu legislatif.¹³⁰ Kedua regulasi berkontribusi signifikan memfilter peserta

¹²³ Lili Romli, 2019, *Op.Cit.*, h. 5

¹²⁴ Undang-Undang No. 12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 7

¹²⁵ Terkait partai Islam yang menjadi peserta pemilu 2004 lihat Ridho Al-Hamdi, *Op.Cit.*, h. 118.

¹²⁶ Lili Romli, 2019, *Op.Cit.*, h. 37

¹²⁷ Undang-Undang No. 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8.

¹²⁸ Tentang partai Islam peserta pemilu 2009 lihat, Ridho Al-Hamdi, *Op.Cit.*, h.122.

¹²⁹ Tentang partai Islam yang lolos *parliamentary threshold* sebesar 2,5% pada pemilu 2009 lihat Lili Romli, 2019, *Op.Cit.* h. 56.

¹³⁰ Undang-Undang No. 10 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pasal 8

pemilu 2014 dengan hanya 12 partai termasuk 5 partai Islam yaitu PKB, PPP, PAN, PKS, dan PBB.¹³¹ Regulasi juga diperkuat dengan peningkatan *parliamentary threshold* menjadi 3,5% yang menghasilkan 10 partai di DPR. Sementara dari 5 partai Islam, satu-satunya yang gagal memenuhi *parliamentary threshold* adalah Partai Bulan Bintang (PBB).¹³²

Ketika Joko Widodo menggantikan SBY tahun 2014, tidak ada perubahan signifikan terkait regulasi partai politik karena UU No. 2 Tahun 2011 dinilai masih cukup efektif. Dengan regulasi tersebut 16 partai dinyatakan lolos sebagai peserta pemilu 2019, termasuk 5 partai Islam yaitu PKB, PAN, PKS, PPP, dan PBB.¹³³ Namun penguatan dilakukan dengan penetapan UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang menaikkan *parliamentary threshold* dari 3,5% menjadi 4%. Kenaikan tersebut memfilter jumlah partai yang lolos di DPR hasil pemilu 2019 hanya 9 partai termasuk 4 partai Islam, yaitu PKB, PAN, PKS, dan PPP.¹³⁴

Serangkaian kebijakan tersebut mampu memfilter jumlah partai politik peserta pemilu maupun di parlemen. Namun di sisi lain berbagai regulasi tersebut terutama *parliamentary threshold* telah menciptakan persaingan sengit antar partai. *Setting* kelembagaan ini memicu *reactive sequence* dari agen partai-partai Islam dengan merubah kecenderungan partai menjadi *catch all parties*, meminjam istilah Otto Kirchheimer.¹³⁵ Ada tiga indikasi kecenderungan menjadi *catch all parties* tersebut. *Pertama*, berkembangnya wacana sebagai partai terbuka dengan pengakomodasian non Muslim ke dalam kepengurusan partai dan calon legislatif. *Kedua*, ditinggalkan basis pengkaderan partai dengan standar nilai dan ideologi dengan perekrutan artis-artis sebagai caleg serta menjadikannya *vote getter* dalam pemilu. *Ketiga*, ditinggalkan aspek ideologi sebagai basis landasan membangun koalisi baik dalam pemilu legislatif, pemilu presiden maupun pilkada.

Namun *reactive sequence* ini justru menjadikan kaburnya sekat ideologis antara partai Islam dengan partai nasionalis sekuler (non Islam) sehingga menurunkan daya tarik elektoral partai Islam dihadapan konstituen Muslim. Karena di sisi lain partai

¹³¹ Lili Romli, 2019, *Op.Cit.*, h. 77.

¹³² *Ibid.* h. 81.

¹³³ *Ibid.* h. 115.

¹³⁴ *Ibid.* hal.138

¹³⁵ Otto Kirchheimer, "Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat" dalam Ichlasul Amal (ed). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*, Edisi Kedua, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012), h. 51-52.

nasionalis sekuler, mengacu pendapat Baswedan, melakukan perubahan orientasi dengan kecenderungan menjadi *Islam-friendly parties* yaitu berusaha mengakomodasi kepentingan umat Islam untuk kepentingan elektoral.¹³⁶

Hasilnya partai Islam mengalami kekalahan sepanjang pemilu legislatif era reformasi sejak tahun 1999 hingga 2019. Pada pemilu 1999 partai Islam hanya berada di posisi 3 besar yaitu PKB dengan 12,60% suara, di bawah PDI Perjuangan dan Golkar. Demikian juga pemilu 2004 pada posisi yang sama di bawah Golkar dan PDI Perjuangan yang ditempati oleh PKB dengan 10,57% suara. Sedangkan pemilu 2009 yang dimenangkan Demokrat, partai Islam merosot ke-4 besar yang diraih PKS dengan 7,88% suara. Posisi partai Islam kembali turun ke-5 besar pada pemilu 2014 yang dimenangkan PDI Perjuangan, yaitu PKB dengan 9,04% suara. Pemilu 2019 dimenangkan kembali PDI Perjuangan, meskipun partai Islam berhasil menaikkan posisinya ke-4 besar yang diduduki PKB dengan 10,57% suara.¹³⁷

Dari perspektif *path dependence* kekalahan partai Islam pada era reformasi ini merupakan *outcomes* yang terkait dengan keputusan politik yang dibuat agen partai Islam dengan pendirian partai-partai baru pada awal reformasi tahun 1998 dalam momen *critical juncture* ketiga. Keputusan politik tersebut mengunci atau *lock in* partai Islam ke dalam jalur terpolarisasi dan kondisi *inertia*, yaitu ketika keputusan politik untuk mendirikan partai-partai Islam baru dilakukan menjadi sangat sulit menyatukannya kembali sehingga suara umat Islam terpecah.

Momen *critical junctures* ketiga juga berkontribusi pembentukan *structural and institutional persistence* yang memicu *reactive sequence* yaitu keputusan agen partai Islam bertransformasi ke arah *catch all parties*. Keputusan ini menjadikan tidak ada batas yang tegas antara partai Islam dengan partai nasionalis, sehingga mempengaruhi daya elektoralnya. Kekalahan juga diperparah konflik internal di hampir semua partai Islam yang menjadikan mereka tidak bisa melakukan penguatan kelembagaan internal sehingga gagal bersaing dengan partai non Islam lainnya dalam kontestasi pemilu legislatif sejak 1999 hingga 2019.

¹³⁶ Anis Rasyid Baswedan, *Loc.Cit.*

¹³⁷ Lili Romli, 2019, *Loc.Cit.*

Kesimpulan

Dari uraian sebelumnya terkait kekalahan partai Islam Indonesia studi ini mengajukan dua temuan utama. *Pertama*, kekalahan partai Islam Indonesia sepanjang lintasan politik sejak era Orde Lama hingga reformasi merupakan hasil dari mekanisme kausal yang terkait keputusan politik yang dibuat agen partai pada peristiwa historis masa lalu dalam momen *critical junctures*. Momen tersebut memiliki efek signifikan terhadap jalur perkembangan partai Islam yang mengarahkan kepada *outcomes* atau hasil-hasil kekalahan dalam setiap pemilu legislatif.

Kedua, kekalahan partai Islam Indonesia sepanjang lintasan politik dari Orde Lama hingga era reformasi mengindikasikan sebuah proses *path dependence repetition* yaitu meliputi tiga proses *path dependence* yang masing-masing dipicu oleh momen *critical junctures*. Ketiga momen tersebut memicu rangkaian urutan peristiwa lanjutan yang bersifat kausal berupa proses *reactive sequences*, *reinforcement* atau *self reinforcing sequences*, serta *reinforcement* atau *self reinforcing sequences* dan *reactive sequence* yang mengarahkan kepada hasil akhir atau *final outcome* kekalahan dalam setiap pemilu legislatif sejak 1955 hingga 2019.

Temuan ini menawarkan kontribusi untuk melengkapi kajian yang ada tentang kekalahan partai Islam yaitu mengkaitkan kekalahan dengan sejarah sendiri sebagai konteksnya. Hal ini berbeda dengan mayoritas kajian lain yang lebih menempatkan kekalahan partai Islam dalam konteks di luar dirinya seperti ekonomi, demokrasi, *civil society*, dan sebagainya.

DAFTAR PUSTAKA

- Alexander, Gerard. "Institutions, Path Dependence, and Democratic Consolidation" dalam *Journal of Theoretical Politics*, Vol. 13, No. 3 (2001), h. 249–270.
- Al-Hamdi, Ridho. *Partai Politik Islam Teori dan Praktik Politik di Indonesia*. Yogyakarta : Graha Ilmu, 2013.
- Annisa, Verdiantika. "Mengapa Partai Islam Kalah?: Analisis Masalah Organisasi Pada Partai Islam di Indonesia". *Thesis*. Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, 2018.
- Anwar, M. Syafi'i. *Pemikiran dan Aksi Islam Indonesia: Sebuah Kajian Politik tentang Cendekiawan Muslim Orde Baru*. Jakarta: Paramadina, 1995.

- Arthur, W. Brian. *Increasing Returns and Path Dependence in the Economy*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 1994.
- Asfar, Muhammad. *Pemilu dan Perilaku Pemilih 1955-2004*. Surabaya: Pustaka Eureka, 2006.
- Baswedan, Anies Rasyid. "Political Islam in Indonesia: Present and Future Trajectory" dalam *Asian Survey*, Vol. 44, No. 5 (2004), h. 669-690.
- Berman, Sheri. "Path Dependency and Political Action: Re-examining Responses to the Depression" dalam *Comparative Politics*, Vol. 30, No. 4 (1998), h. 379-400.
- Bubalo, Anthony & Greg Fealy, Whit Mason. *PKS dan Kembarannya: Bergiat Jadi Demokrat di Indonesia, Mesir dan Turki*. Depok: Komunitas Bambu, 2012.
- Bush, Robin. *Nahdlatul Ulama and The Stuggle for Power Within Islam and Politics In Indonesia*. Singapore: ISEAS, 2009.
- Cappocia, Giovanni & R. Daniel Kelemen. "The Study of Critical Junctures Theory, Narrative, and Counterfactuals In Institutional Analysis" dalam *World Politics*, Vol. 59, No.3 (2007), h. 341-369.
- Choia, Chang Gyu & Sugie Leeb, Heungsoon Kimb, Eun Yeong Seonga. "Critical Junctures and Path Dependence in Urban Planning and Housing Policy: A review of greenbelts and New Towns in Korea's Seoul Metropolitan Area" dalam *Land Use Policy*, Vol. 80 (2019), h. 195-204.
- Collier, Ruth Berins & David Collier. *Shaping The Political Arena: The Labor Movement, And Regimne Dynamics In Latin America*. Notre Dame: University of Notre Dame Press, 2002.
- Crouch, Harold. *Militer dan Politik di Indonesia*. Jakarta: Sinar Harapan, 1986.
- David, Paul A. "Clio and the economics of QWERTY" dalam *The American Economic Review*, Vol. 75, No. 2 (1985), h. 332-337.
- Effendy, Bahtiar. "Islam and the State in Indonesia: Munawir Sjadzali and the Development of a New Theological Underpinning of Political Islam" dalam *Studia Islamika*, Vol. 2, No. 2 (1995), h. 97-121.
- . *Islam dan Negara: Transformasi Gagasan dan Praktik Politik Islam di Indonesia*. Jakarta: Paramadina, 2009.
- El-Sherif, Ashraf. *The Egyptian Muslim Brotherhood's Failures*. Washington, D.C: Carnegie Endowment for International Peace, 2014.
- Fealy, Greg. *Ijtihad Politik Ulama: Sejarah NU 1952-1967*. Yogyakarta: LKiS, 2003.

Feith, Herbert. *Pemilu 1955*. Jakarta: LP3ES, 1985.

------. *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Ithaca New York: Cornell University Press, 1962.

Gaffar, Afan. *Javanese Voters*. Yogyakarta: UGM Press, 1982.

Goldstone, Jack A. “Initial Conditions, General Laws, Path-Dependence, and Explanation in Historical Sociology” dalam *American Journal of Sociology*, Vol. 104, No. 3 (1998), h. 829–845.

Greener, Ian. “Understanding NHS Reform: The Policy-transfer, Social Learning, and Pathdependency Perspectives” dalam *Governance*, Vol. 15, No. 2 (2002), h. 161–183.

Gulalp, Haldun. “Political Islam in Turkey: The Rise and Fall of the Refah Party” dalam *The Muslim World*, Vol. 89, No. 1(1999), h. 22-41.

Hakim, Sudarnoto Abdul. “The Partai Persatuan Pembangunan: Political Journey of Islam under Indonesia’s New Order (1973-1997)”. *Thesis*. Montreal: Institute of Islamic Studies McGill University, 1993.

Hamayotsu, Kikue. “The End of Political Islam? A Comparative Analysis of Religious Parties in the Muslim Democracy of Indonesia” dalam *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, Vol. 30, No. 3 (2011), h.133-159.

Hansen, Randall. “Globalization, Embedded Realism, and Path Dependence: The Other Immigrants to Europe” dalam *Comparative Political Studies*, Vol. 35, No. 3 (2002), h. 259–283.

Haris, Syamsudin. “Masa Depan Partai Islam di Indonesia: Sebuah Analisis Penutup” dalam dalam Moch Nurhasim (ed.). *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016.

Hogan, John W. “Remoulding the Critical Junctures Approach” dalam *Canadian Journal of Political Science*, Vol.39, No.3 (2006), h. 657-679.

Holzinger, Katharina & Christoph Knill. “Path Dependencies in European Integration: A Constructive Response to German Foreign Minister Joschka Fischer” dalam *Public Administration*, Vol. 80, No. 1 (2002), h. 125–152.

Karakoc, Ekrem & Elisabeth Gidengil. “Which Matters More in The Electoral Success of Islamist (successor) Parties: Turkish Case” dalam *Party Politics*, Vol. 22, No. 3 (2016), h. 325-338.

- Karim, Abdul Gaffar. *Metamorfosis NU dan Politisasi Islam di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LKiS, 1995.
- Kirchheimer, Otto. “Transformasi Sistem-Sistem Kepartaian Eropa Barat” dalam Ichlasul Amal (ed). *Teori-Teori Mutakhir Partai Politik*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 2012.
- Liddle, R. William. *Pemilu-Pemilu Orde Baru: Pasang Surut Kekuasaan Politik*. Jakarta: LP3ES, 1982.
- Lipset, Seymour M. & Stein Rokkan. “Cleavege Structures, Party Systems, and Voters Alignments: An Introduction” dalam Seymour M. Lipset & Stein Rokkan (ed.). *Party Systems And Voters Alignments: Cross- National Perspective*. New York: The Free Press, 1967.
- Maarif, Ahmad Syafii. *Islam dan Pancasila sebagai Dasar Negara: Studi tentang Perdebatan dalam Konstituante*. Jakarta: LP3ES, 2006.
- Madinier, Remy. *Partai Masyumi: Antara Godaan Demokrasi dan Islam Integral*. Jakarta: Penerbit Mizan, 2013.
- Madjid, Nurcholis. “Keharusan Pembaruan Pemikiran Islam dan Masalah Integrasi Umat” dalam Nurcholis Madjid, dkk. *Pembaharuan Pemikiran Islam*. Jakarta: Islamic Research Centre, 1970.
- Mahendra, Yusril Ihza. “Harun Nasution dan Pemikiran Politik Islam: Tentang Islam dan Masalah Negara”, dalam Harun Nasution (ed.). *Refleksi Pembaharuan Pemikiran Islam: 70 Tahun Harun Nasution*. Jakarta: Panitia Penerbitan Buku dan Seminar 70 Tahun Harun Nasution bekerjasama dengan Lembaga Studi Agama dan Filsafat, 1989.
- Mahoney, James. “Path Dependence in Historical Sociology” dalam *Theory and Society*, Vol. 28, No. 4 (2000), h. 507–548.
- . “Path-Dependent Explanations of Regime Change: Central America in Comparative Perspective” dalam *Studies in Comparative International Development*, Vol. 36, No. 1 (2001a), h. 111-141.
- . *The Legacies of Liberalism Path Dependence and Political Regimes in Central America*. Baltimore: Johns Hopkins University Press, 2001b.
- Mandan, Arief Mudatsir. *Krisis Ideologi: Catatan tentang Ideologi Politik Kaum Santri Studi Kasus ,Penerapan Ideologi Islam PPP*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2009.
- Maridjan, Kacung. *Quo Vadis NU Setelah Kembali ke Khittah 1926*. Jakarta: Penerbit Erlangga,1992.

- Marzo, Pietro. "Critical Junctures, Path Dependence and Al-Nahda' Contribution to the Tunisian Transition to Democracy" dalam *The Journal Of North African Studies*, Vol. 24, No. 6 (2019), h. 914-934.
- Masoud, Tarek El-Miselhy. "The Muslim Brotherhood In Egypt" dalam John L. Esposito & Emad El-Din Shahin (ed). *The Oxford Handbook of Islam and Politics*. Oxford: Oxford University Pres, 2013.
- . "Why Islam Wins: Electoral Ecologies and Economies of Political Islam in Contemporary Egypt". *Dissertation*. Connecticut: Yale University, 2008.
- Miichi, Ken. "Democratitition and "Failure" of Islamic Parties" dalam Ken Miichi & Omar Farouk (ed.). *Southeast Asian Muslims in the Era of Globalization*. London: Palgrave Macmillan, 2015.
- Mujani, Saiful & R. William Liddle. "Muslim Indonesia's Secular Democracy" dalam *Asian Survey*, Vol. 49, No. 4 (2009), h. 575-590.
- Noer, Deliar. *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*. Jakarta: LP3ES, 1980.
- . *Partai Islam di Pentas Nasional: 1945-1965*. Jakarta: PT Puska Utama Grafiti, 1987.
- North, Douglass C. *Institutions, Institutional Change and Economic Performance*. Cambridge: Cambridge University Press, 1990.
- Norton, Augustus Richard. "Thwarted Politics: The Case of Egypt's Hizb al-Wasat" dalam Robert W. Hefner (ed.), *Remaking Muslim Politics: Pluralism, Contestation, Democratization* (Princeton: Princeton University Press, 2005).
- Nurdin, M. Amin & Ali Thaufan Dwi Saputra, Adi Prayitno. *Prahara Partai Islam: Komparasi Konflik Internal PP dan PKS*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2019.
- Nurhasim, Moch (ed.). *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016.
- , dkk. "Masa Depan Partai Islam Indonesia" dalam *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 13, No. 2 (2016), h. 227-244.
- . "Stagnasi Elektoral Partai Persatuan Pembangunan", dalam Moch Nurhasim (ed.). *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016.

- Nuryanti, Sri. "Masa Depan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)" dalam Moch Nurhasim (ed.). *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016.
- Pepinsky, Thomas B. & William Liddle, Saiful Mujani. "Testing Islam Political Advantage: Evidence From Indonesia" dalam *American Journal of Political Science*, Vol. 56, No. 3 (2012), h. 584-600.
- Permata, Ahmad Norma. "The Prosperous Justice Party (PKS) and Decline of Political Islam in the 2009 Election in Indonesia" dalam Remy Madinier (ed). *Islam and The 2009 Indonesian Election: Political and Cultural Issues*. Bangkok: IRASEC, 2010.
- Pierson, Paul. "Increasing Returns, Path Dependence, and the Study of Politics" dalam *The American Political Science Review*, Vol. 94, No. 2 (2000), h. 251-267.
- Qodir, Zuly. *Islam Liberal*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Riyanto, Agus. "Wacana Islam Liberal: Analisis Wacana Tulisan-Tulisan di www.Islib.com". *Tesis*. Yogyakarta: Sekolah Pasca Sarjana Program Studi Ilmu Politik, UGM, 2006.
- Romli, Lili. "Dinamika Partai Politik Islam di Indonesia Perspektif Historis" dalam Moch. Nurhasim (ed.). *Masa Depan Partai Islam Indonesia: Studi tentang Volatilitas Elektoral dan Faktor-Faktor Penyebabnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar dan LIPI, 2016.
- ". "Partai Islam dan Pemilu 2009" dalam *Poelitik: Jurnal Kajian Politik dan Masalah Pembangunan*, Vol. 5, No. 1 (2009), h. 444-461.
- ". *Pemilu Era Reformasi dan Konfigurasi Peta Kekuatan Partai Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Safa`at, Muchamad Ali. "Pembubaran Partai Politik di Indonesia: Analisis Pengaturan Hukum dan Praktik Pembubaran Partai Politik (1959 – 2004)". *Disertasi*. Jakarta, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Saleem, Raja M. Ali. "Identifying Islamic Parties Using Gunther and Diamond's Typology" dalam *SAGE Open* (2014), h. 1-8.
- Salih, Mohammed & Abdullahi Osman El-Tom. "Introduction" dalam Mohammed Salih (ed.). *Interpreting Islamic Political Parties*. Houndmills, Basingstoke RG21 6XS, England: Palgrav Macmillan, 2009.
- Seokanto, Sitoresmi S. *Strategi Pemenangan Pemilu AKP di Turki dan PKS di Indonesia: Studi Perbandingan*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2016.

- Shahin, Emad Eldin. *Political Ascent: Contemporary Islamic Movements in North Africa*. Boulder: Westview Press, 1997.
- Simon, Herbert A. "Theoris of Bouded Rationality" dalam C.B. McGuire & Roy Redner (ed.). *Decision and Organization: A Volume in Honor of Jacob Marschak*. Amsterdam, NL: North-Holland Publishing Company, 1972.
- Sitompul, Einar Martahan. *NU dan Pancasila*. Jakarta, Pustaka Sinar Harapan, 1996.
- Subekti, Valina Singka. *Partai Syarikat Islam Indonesia: Kontestasi Politik hingga Konflik Kekuasaan Elite*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014.
- Sukmajati, Mada. "How Islamic Parties Organize At The Local Level In Post-Suharto Indonesia: An Empirical Study of Six Major Islamic Parties In The Tasikmalaya District, West Java Province". *Dissertation*. Heidelberg: Universität Heidelberg, 2011.
- Suryadinata, Leo. *Golkar dan Militer: Studi tentang Budaya Politik*. Jakarta: LP3ES, 1992.
- Takayuki, Yokota. "Democratization and Islamic Politics: A Study on the Wasat Party in Egypt" dalam *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, Vol. 1, No. 2 (2007), h. 148-164.
- Thaba, Abdul Aziz. *Islam dan Negara Dalam Politik Orde Baru*. Yogyakarta : Gema Insani Pres, 1996.
- Thelen, Kathleen. "Historical Institutionalism in Comparative Politics" dalam *Annual Review Political. Science*, Vol. 2 (1999), h. 369-404.
- Torring, Jacob. "Path-dependent Danish Welfare Reforms: The Contribution of the New Institutionalisms to Understanding Evolutionary Change" dalam *Scandinavian Political Studies*, Vol. 24, No. 4 (2001), h. 277-309.
- Ufen, Andreas. "Political Parties in Post-Suharto Indonesia: Between Politik Aliran and 'Philippinisation'" dalam *GIGA Working Papers*, No. 37 (2006), h. 1-36.
- Wahid, Abdurahman. "Pribumisasi Islam" dalam Muntaha Azhari & Abdul Mun'im Saleh (ed.). *Islam Indonesia Menatap Masa Depan*. Jakarta : P3M, 1989.
- Warjio. *Gagalnya Partai Politik Islam*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2018.
- Woischnik, John & Philipp Muller. "Islamic Parties and Democracy In Indonesia" dalam *Kas International Reports*, No. 10 (2013), h. 59-79.
- Yumitro, Gonda. "Partai Islam dalam Dinamika Demokrasi di Indonesia" dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol.17, No. 1 (2013), h. 35-50.

Zemni, Sami & Koenraad Bogaert. "Egyptian Muslim Brotherhood and Competitive Politics" dalam Mohammed Salih (ed). *Interpreting Islamic Political Parties*. Houndmills, Basingstoke RG21 6XS, England: Palgrav Macmillan, 2009.

PEDOMAN PENULISAN JURNAL POLITIK PROFETIK

Sebelum penulis mengirim naskah ke redaksi Jurnal Politik Profetik (JPP), sebaiknya mengikuti ketentuan dan sistematika penulisan di bawah ini:

A. Pedoman Untuk Artikel

1. Topik yang dipublikasikan oleh Jurnal Politik Profetik berhubungan dengan Politik Islam, Demokrasi, Pemilu dan Partai Politik, Gerakan Sosial Islam dan Politik Lokal.
2. Masalah yang diangkat sebaiknya kasus 5 tahun terakhir (jika penelitian lapangan) yang memuat unsur kebaruan.
3. Naskah belum pernah dipublikasikan.
4. Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.
5. Naskah yang dikirim ke JPP tidak dibenarkan dikirim ke penerbit lain untuk dipublikasikan sebelum ada keputusan dari pengelola JPP, dimuat atau tidaknya.
6. Panjang artikel sekitar 6000-8000 kata, namun naskah yang lebih panjang akan dipertimbangkan.
7. Naskah harus diserahkan untuk dipertimbangkan melalui website Jurnal Politik Profetik pada link <http://journal.uin-alauddin.ac.id/index.php/jpp/about/submissions#online>
Submissions
8. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
9. Penulis harus bersedia untuk merevisi naskah berdasarkan masukan dari Editor dan Mitra Bestari.
10. Redaksi berhak menolak naskah yang tidak memenuhi kriteria/persyaratan teknis, mengadakan perubahan susunan naskah, memperbaiki bahasa dan berkonsultasi dengan penulis sebelum naskah dimuat.
11. Sistematika Penulisan:
 - a. **Judul Artikel**
Judul artikel harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 16 kata.
 - b. **Nama Penulis**
Cukup nama penulis tanpa menyertakan gelar
 - c. **Profesi/Institusi dan Email Penulis**
 - d. **Abstrak**

Abstrak berisikan tentang: tujuan dan manfaat mansukrip ini, metodologi penelitian, hasil penelitian, dan kesimpulan. Pastikan kesemuanya itu dibuat dengan sepadat dan sejelas-jelasnya. Abstrak menggunakan Bahasa Indonesia dengan jumlah kata kisaran 150-250 kata.

e. Kata Kunci

Kata kunci merefleksikan ide pokok dari naskah. Kata kunci memuat maksimal 5 kata kunci.

f. Abstract

g. Keywords

h. Pendahuluan

Pendahuluan harus menggambarkan dengan jelas latar belakang masalah dan memuat pertanyaan apa yang akan dijawab dalam pembahasan. Bagian ini penulis mesti memberi argumen tentang pentingnya penelitian dilakukan. Pengutipan setiap karya tulis orang lain harus menggunakan Catatan Kaki/*Footnote* (Lihat Gaya Selingkung JPP). Istilah-istilah asing dicetak miring (*italic*).

i. Tinjauan Pustaka/*Literature Review*

Pada bagian ini semaksimal mungkin berisi uraian sistematis tentang informasi hasil-hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan. Bagian ini memuat kelebihan dan kelemahan pada penelitian terdahulu yang dapat dijadikan argumen bahwa penelitian yang dikerjakan ini bersifat menyempurnakan atau mengembangkan penelitian terdahulu. Di sini perlu juga mempertegas kebaruan dari penelitian penulis.

j. Tinjauan Teori

Bagian ini juga memuat landasan teori berupa rangkuman teori-teori dari pustaka yang mendukung penelitian, serta memuat penjelasan tentang konsep dan prinsip dasar yang diperlukan untuk pemecahan permasalahan. Landasan teori berbentuk uraian kualitatif, model matematis, atau tools yang langsung berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Bagian ini, penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Tinjauan Teori”, namun langsung menuliskan subbab nama teori dan penjelasannya.

k. Metode Penelitian

Bagian ini memaparkan metode penelitian yang akan digunakan, di antaranya desain dan pendekatan penelitian, teknik pengambilan dan analisis data.

l. Hasil dan Pembahasan

Pada bagian ini, hasil penelitian dijelaskan secara komprehensif (singkat, padat dan jelas). Jika terdapat tabel dan gambar, atau figur-figur lainnya yang ada pada manuskrip, semuanya diletakkan simetris di tengah (seimbang antara kiri dan kanan). Bagian ini,

penulis boleh tidak menuliskan Subbab “Hasil dan Pembahasan”, namun langsung pada subbab inti persoalan yang sedang dibicarakan.

m. Kesimpulan

Kesimpulan menyesuaikan dengan apa yang diharapkan pada bagian pendahuluan di atas. Bagian ini dibuat dengan sesingkat dan sejelas mungkin.

n. Daftar Pustaka

Sumber rujukan minimal 75% berasal dari jurnal ilmiah/buku terbitan lima tahun terakhir. Disarankan mengutip satu sampai tiga artikel dari terbitan Jurnal Politik Profetik.

B. Pedoman Untuk Ulasan Buku

1. Harap sertakan di awal ulasan: Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN. Misalnya:



Syarifuddin Jurdi. *Muhammadiyah dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010. Cetakan: I. Halaman: xxxviii+520. ISBN: 9786028479943.

2. Buku yang diulas merupakan buku terbitan 2 tahun terakhir.
3. Ulasan ditulis menggunakan Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
4. Naskah diketik dengan komputer menggunakan Microsoft Word, di atas kertas ukuran 21 cm x 29,7 cm (A4), spasi 1,5, huruf Times New Roman dan font size 12 pt..
5. Panjang rata-rata tulisan sekitar 2000-2500 kata.
6. Tinjauan harus dimulai dengan deskripsi singkat keseluruhan isi buku.
7. Hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan meliputi:
 - Kekuatan dan kelemahan buku yang diulas.
 - Mengomentari gaya dan presentasi penulis.
 - Apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak.
 - Kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks.
 - Kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.
8. Penulisan referensi mengacu pada *Gaya Selingkung JPP*.
9. Sistematika Penulisan:

a. Judul

Judul ulasan harus padat, jelas dan tanpa singkatan. Jumlah maksimal 10 kata.

b. Identitas Buku

Identitas buku berisi Sampul Buku, Nama Penulis, Judul, Tempat, Penerbit, Tahun, Cetakan, Jumlah halaman, ISBN.

c. Nama Pengulas

Nama pengulas ditulis tanpa menggunakan gelar.

d. Afiliasi dan Email Pengulas

Institusi tempat pengulas bernaung serta alamat email yang dapat digunakan untuk berkorespondensi.

e. Isi Ulasan

Isi ulasan memuat tentang deskripsi singkat keseluruhan isi buku dan hal-hal yang dapat dipertimbangkan dalam tubuh tinjauan. Misalnya kekuatan dan kelemahan buku yang diulas, mengomentari gaya dan presentasi penulis, apakah tujuan penulis telah terpenuhi atau tidak, kesalahan (tipografi atau lainnya) dan kegunaan indeks serta kepada siapa buku itu berguna dan direkomendasikan.

f. Daftar Pustaka

Jika menggunakan sumber rujukan, maka pengutipan mengikuti *Gaya Selingkung JPP*.

GAYA SELINGKUNG JURNAL POLITIK PROFETIK

BUKU

Footnote:

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

Bibliography:

Jarry, David & Julia Jarry. *Collin Dictionary of Sociologi*. Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991.

ARTIKEL DALAM BUKU

Footnote:

¹Tom B. Bottomore, “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.), *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial* (Jakarta: LP3ES, 1990), h. 24.

Bibliography:

Bottomore, Tom B. “Kelas Elite dan Masyarakat” dalam Sartono Kartodirdjo (eds.). *Kepemimpinan dalam Dimensi Sosial*. Jakarta: LP3ES, 1990.

ARTIKEL DALAM JURNAL

Footnote:

¹Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679.

Bibliography:

Mkandawire, Thandike. “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No. 5 (2007), h. 679-681.

ARTIKEL PADA MEDIA MASSA

Footnote:

¹Masdar F. Mas’udi, “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

Bibliography:

Mas’udi, Masdar F. “Hubungan Agama dan Negara” dalam *Kompas*, 7 Agustus 2002.

ARTIKEL DARI INTERNET

Footnote:

¹Noer Fauzi Rachman, “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> diakses 31 Mei 2018.

Bibliography:

Rachman, Noer Fauzi. “Master Plan Percepatan dan Perluasan Krisis Sosial-Ekologis Indonesia” dalam <http://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2014/06/Rachman-2014-MP3EI-AMAN1.pdf> / diakses 31 Mei 2017.

ARTIKEL PROSIDING

Footnote:

¹Noorhaidi Hasan, “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshob Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

Bibliography:

Hasan, Noorhaidi. “Memahami Radikalisme Islam” dalam *Paper Workshob Membangun Kesadaran dan Strategi dalam Menghadapi Gerakan Radikalisasi Agama*, Depok, 19 Desember (2011).

SKRIPSI, TESIS, DISERTASI

Footnote:

¹Jumrah, “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. (Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016), h. 10.

Bibliography:

Jumrah. “Politik Dinasti dan Monopoli Kekuasaan”. *Skripsi*. Makassar: Fak. Ushuluddin, Filsafat dan Politik UIN Alauddin, 2016.

DOKUMEN RESMI

Footnote:

¹Mahkamah Konstitusi RI, “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

Bibliography:

Mahkamah Konstitusi RI. “Putusan Nomor 14/PUU-XI/2013 Tentang Pengujian Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” dalam https://www.bphn.go.id/data/documents/7.7._perkara_nomor_14-puu-2013_23_jan_2014_pemilu_presiden_.pdf diakses 1 Juli 2019.

WAWANCARA

Footnote:

¹Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

Bibliography:

Karaeng Tutu, Kepala Desa Bontoa, *wawancara*, 10 Juli 2019.

ATURAN PENULISAN FOOTNOTE (*Ibid.*, *Op.Cit.*, *Loc.Cit.*)

Ibid

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²*Ibid.*

³*Ibid.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Ibid karena merujuk kepada catatan kaki di atasnya tanpa diselingi catatan kaki lainnya.
- ²Ibid. berarti pengarang, judul, dan halaman sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya.
- ³Ibid., h. 193. berarti pengarang dan judul sama persis dengan catatan kaki yang di atasnya, hanya berbeda halaman. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Op.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Op.Cit.*, h. 193.

Penjelasan contoh

- Menggunakan Op. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Op. Cit.*, h. 193. berarti pengarang (David Jarry & Julia Jarry) dan judulnya (*Collin Dictionary of Sociologi*) sama, hanya saja halamannya berbeda dengan catatan kaki yang pertama. Halaman sebelumnya 188 dan yang dikutip terakhir halaman 193.

Loc.Cit.

Contoh

¹David Jarry & Julia Jarry, *Collin Dictionary of Sociologi* (Glasgow :Harper Collins Publishers, 1991), h. 188.

²Thandike Mkandawire, “Good Governance: The Itinerary of an Idea” dalam *Development in Practice*, Vol. 17, No 4/5 (2007), h. 679.

³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.*

Penjelasan contoh

- Menggunakan Loc. Cit. karena sebelumnya telah diselingi oleh catatan kaki lain, yaitu: ²Thandike Mkandawire.
- Penggunaan ³David Jarry & Julia Jarry, *Loc.Cit.* berarti pengarang, judul, dan halamannya (h. 188) sama.